

STRATEGI PENERAPAN SUKUK DI KABUPATEN BOGOR SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

STRATEGY OF SUKUK IMPLEMENTATION IN BOGOR DISTRICT AS ALTERNATIVE FINANCING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE REGION

Muhamad Komarudin^{1a}; Rahmad Purnama²

^{1a}Universitas Terbuka, Jl. Sholeh Iskandar No.234, RT.02/RW.11, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164, e-mail: muh.komarudin@ecampus.ut.ac.id

²Universitas Terbuka, Jl. Sholeh Iskandar No.234, RT.02/RW.11, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164, e-mail: rahmad.purnama@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah di Jawa barat yang memiliki wilayah yang luas serta sektor perekonomian yang beragam di dukung oleh letak geografis dan posisi yang strategis. Namun, tingkat pembangunan di Kabupaten Bogor masih memerlukan perhatian lebih lanjut terutama untuk daerah terluar. Maka dari itu, dibutuhkan instrumen pendanaan yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi penerapan sukuk di Kabupaten Bogor sebagai alternatif pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di daerah. Penelitian menggunakan metode analisis EFE, IFE dan matriks IE untuk mengetahui posisi Kabupaten Bogor dalam kesiapan menerapkan sukuk daerah, kemudian analisis SWOT untuk mengetahui strategi yang tepat dalam penerapan sukuk daerah di Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil analisis IFE, EFE dan matriks IE, posisi Kabupaten Bogor berada di kuadran 5 yaitu *Growth* (integrasi horisontal atau stabilitas) artinya bahwa perlu kajian lebih mendalam untuk mempersiapkan penerapan sukuk di kabupaten bogor. Karena telah terbukti kabupaten Bogor memiliki potensi investasi yang baik. Apabila sukuk diterapkan, maka sektor perekonomian yang akan dijadikan objek investasi sebaiknya adalah sektor yang sudah terbukti memiliki imbal hasil yang baik dan diminati oleh investor. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh strategi yang tepat dalam penerapan sukuk diantaranya; bekerjasama dengan lembaga perbankan syariah di Bogor, baik dalam promosi maupun penerbitan sukuk daerah, mensosialisasikan sukuk daerah kepada investor, membuat fokus rencana pengembangan pada daerah terluar dengan menggunakan skema investasi berbasis sukuk, memanfaatkan pembangunan di daerah dalam sebagai contoh baik penerapan investasi di daerah dan mengkampanyekan agrowisata sebagai sektor unggulan ekonomi daerah.

Kata Kunci: *Alternatif Pembiayaan, Bogor, Sukuk*

ABSTRACT

Bogor Regency is one of the regions in West Java which has a wide area and diverse economic sectors supported by its geographical location and strategic position. However, the level of development in Bogor Regency still requires further attention, especially for the outermost regions. Therefore, a funding instrument is needed that is able to support economic growth in the region. This study aims to determine the strategy for implementing sukuk in Bogor Regency as an alternative to financing and infrastructure development in the region. This study uses the EFE, IFE and IE matrix analysis methods to determine the position of Bogor Regency in the readiness to implement regional sukuk, then SWOT analysis to determine the

right strategy in implementing regional sukuk in Bogor Regency. Based on the results of the IFE, EFE and IE matrix analysis, the position of Bogor Regency is in quadrant 5, namely Growth (horizontal integration or stability) meaning that a more in-depth study is needed to prepare for the application of sukuk, but Bogor district has been proven to have good investment potential, if sukuk is implemented then the economic sector that will be the object of investment should be a sector that has been proven to have good returns and is in demand by investors. Meanwhile, based on the results of the SWOT analysis obtained the right strategy in the application of sukuk including; Cooperating with Islamic banking institutions in Bogor both in the promotion and issuance of regional sukuk. socializing regional sukuk to investors, focusing on development plans in outermost regions using a sukuk-based investment scheme, utilizing development in the inner regions as a good example of implementing investment in the region and campaigning for agro-tourism as a leading sector of the regional economy

Keyword: *Bogor, Financing Alternative, Sukuk*

Komarudin, M. & Purnama, R. 2022. Strategi Penerapan Sukuk Di Kabupaten Bogor Sebagai Alternatif Pembiayaan Dan Pembangunan Infrastruktur Di Daerah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8(1): 11 – 23.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bogor yang terletak di provinsi Jawa Barat merupakan satu daerah yang memiliki karakteristik demografi berupa pegunungan, sungai, danau, air terjun dan hutan dengan tingkat intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga menjadikan tanahnya subur. Keberadaan kabupaten Bogor yang berada di selatan Ibu Kota Jakarta menjadi keuntungan strategis yang sangat potensial. Keunikan geografis lainnya yang dimiliki kabupaten Bogor adalah wilayah ini sangat luas bahkan mengelilingi wilayah kotamadya Bogor.

Berdasarkan peta kabupaten Bogor, tampak bahwa wilayah Kabupaten Bogor sangat luas, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Banten, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, sebelah timur laut berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sedangkan di tengahnya

berbatasan dengan kotamadya Bogor. (Kabupatenbogor.web.id)

Jumlah penduduk Bogor berdasarkan data BPS kabupaten Bogor pada bulan Februari 2021 adalah sebanyak 5.427.068 jiwa dengan luas Kabupaten Bogor adalah 2.966,20 km². Kesenjangan persebaran penduduk di Kabupaten Bogor cukup signifikan dimana terdapat kecamatan dengan luas wilayah cukup besar, namun memiliki jumlah penduduk relatif tidak banyak seperti kecamatan Cariu yang berbatasan langsung dengan kabupaten Karawang dan kecamatan Sukajaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak Banten. Di sisi lain terdapat luas wilayah yang tidak terlalu besar, namun memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak seperti kecamatan Bojong gede yang berbatasan langsung dengan kotamadya Bogor dan Kabupaten Tangerang. Jumlah Penduduk lebih padat pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kotamadya Bogor. Hal ini karena pusat perekonomian dan pembangunan cenderung masih tersentralisasi di tengah sekitar kotamadya.

Luasnya wilayah kabupaten Bogor membuat beranekaragamnya sektor-sektor penunjang perekonomian, dari sektor pariwisata, sektor industri, sektor pertanian, sektor perdagangan dan lain sebagainya. Untuk mendukung efektifitas sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Bogor, pemerintah membangun infrastruktur-infrastruktur yang meningkatkan mobilitas usaha masyarakat, pemerintah maupun industri. Kabupaten Bogor yang cukup luas juga membuat kurangnya pemerataan pembangunan sehingga terjadinya kesenjangan pembangunan wilayah, dimana Wilayah Pengembangan Tengah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan dua Wilayah Pengembangan lainnya (Utami, 2017: 1-8). Hal ini karena wilayah pengembangan tengah selain lebih dekat dengan wilayah kotamadya juga memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi sehingga pengembangan perekonomian masih terpusat di wilayah tengah.

Semakin banyak dana pembangunan maka pembangunan daerah akan lebih cepat tercapai, terutama dalam pembangunan ekonomi. Dana yang tersedia untuk pembangunan salah satunya bersumber dari pembiayaan pembangunan yang dimiliki. Semakin besar pembiayaan yang dimiliki maka akan semakin besar juga pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan.

Peran penting pembangunan ekonomi semakin besar di tengah berlangsungnya pandemic covid 19 yang menyerang seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia dan daerah-daerah di Nusantara. Dampak dari Covid 19 bukan hanya mengurangi pendapatan negara, tetapi paling terasa oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yang memperoleh penghasilan dari usaha-usaha harian. Pemanfaatan dana dari masyarakat lebih baik daripada melakukan pinjaman terutama pinjaman luar negeri yang biasanya memberlakukan tingkat bunga yang sangat tinggi (Komarudin, 2021: 41-55), pemanfaatan dana dari masyarakat

bisa menggunakan skema surat utang seperti obligasi atau pun sukuk.

Kata “sukuk” pertama kali diperkenalkan kembali dan diajukan sebagai salah satu alat keuangan Islam pada rapat ulama fikih sedunia yang diselenggarakan oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2002. Secara singkat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai berikut: “sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu”. Sukuk sendiri bukanlah merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah dan musyarakah atau didasarkan pada prinsip jual-beli jika menggunakan akad murabahah dan/atau prinsip sewa-menyewa jika menggunakan akad ijarah. Transaksinya bukan akad hutang piutang melainkan penyertaan, jual-beli atau sewa-menyewa. Sukuk adalah obligasi dengan implementasi berprinsip syariah dan dalam penerbitannya harus ada unsur *underlying asset*.

Adanya gap tingkat kesenjangan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor (Utami, 2017: 1-8), serta kurangnya pendanaan pembangunan infrastruktur dapat diatasi dengan penerbitan sukuk, dimana dana-dana yang dihimpun dari penerbitan sukuk selain bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur juga untuk mempersempit gap kesenjangan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor, dimana dalam jangka panjang akan meningkatkan perekonomian dan penerimaan daerah.

MATERI DAN METODE

Tinjauan Literatur

Peraturan Pemerintah sudah dua kali diterbitkan terkait dengan pinjaman daerah yang kemudian disusul oleh Peraturan

Menteri Keuangan terkait obligasi daerah. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah kemudian disusul oleh Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah yang disusul oleh Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, dan pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.07 /2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan yang sudah beberapa kali diterbitkan dan diperbaharui, mengindikasikan bahwa pemerintah pusat sangat mendukung terealisasinya obligasi daerah guna mempercepat dan meningkatkan pembangunan daerah. Namun ternyata, jangankan sukuk, obligasi daerah saja belum begitu menarik minat pemerintah daerah sebagai instrumen pendanaan daerah. Padahal dalam peraturan menteri keuangan sudah begitu spesifik mengatur tentang obligasi daerah ini termasuk menyediakan lampiran format surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah, format kerangka acuan kegiatan, format penghitungan utang dan lain-lain.

Pada tahun 2012, provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah. Rencananya pemerintah Jakarta akan menerbitkan surat utang senilai Rp 1,7 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai empat proyek: pembangunan RSUD Jakarta Selatan senilai Rp 185 miliar, pengelolaan air limbah di kawasan Casablanca Rp 235 miliar, pendirian rumah susun di Daan Mogot Rp 500 miliar, dan pembangunan terminal bus di Pulogebang Rp 757 miliar. Penerbitan obligasi tersebut

telah dicatat sebagai penerimaan pembiayaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2012 yang telah disahkan. Pada tahun 2012 anggaran Jakarta ditetapkan Rp 36,023 triliun. Meningkat dibanding APBD Perubahan 2011 sebesar Rp 31,7 triliun. Sumber pembiayaan adalah pendapatan daerah Rp 30,642 triliun. Sehingga terjadi defisit, yang akan ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2011 Rp 3,680 triliun dan penerbitan obligasi daerah Rp 17 triliun. Namun, Joko Widodo (yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta) menganggaap Jakarta belum begitu membutuhkan obligasi atau surat utang karena APBD DKI Jakarta masih cukup untuk defisiensi keseluruhan sektor, sehingga beliau menghapus kebijakan penerbitan obligasi daerah pemerintah DKI Jakarta.

Meskipun aturan yang khusus terkait sukuk daerah belum diterbitkan. Tetapi dengan adanya dua peraturan pemerintah dan tiga peraturan menteri keuangan tentang obligasi daerah seharusnya bisa menjadi stimulus bagi pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia untuk menerbitkan sukuk daerah di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis SWOT dilakukan dalam rangka menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan penerapan Sukuk daerah di Kabupaten Bogor kemudian dibuat analisis strategi penerapan sukuk berdasarkan hasil analisis SWOT dan data observasi tingkat pembangunan daerah.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Bogor, kemampuan keuangan pemerintah, kemampuan mengumpulkan dan mengelola dana, serta sektor-sektor potensial di kabupaten Bogor yang mendukung penerapan sukuk daerah sebagai instrumen pembangunan yang memberikan nilai lebih bagi investor. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan observasi, dokumentasi, dan interview semi-structured.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT untuk menganalisis faktor-faktor internal Kabupaten Bogor sehingga bisa diketahui apa saja faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Selain itu dilakukan juga analisis faktor eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman. Metode SWOT digunakan karena dalam penerapan sukuk daerah di Kabupaten Bogor, terlebih dahulu harus diketahui potensi dan masalah internal serta potensi dan masalah eksternal yang dihadapi kabupaten Bogor dalam menerapkan dan mengembangkan sukuk daerah, kemudian hasil analisis ini dijadikan bahan pertimbangan pembuatan saran kebijakan terkait penerapan sukuk daerah di Kabupaten Bogor.

Proses penyusunan perencanaan strategi dalam analisis SWOT melalui 3 tahap analisis yaitu:

a. Tahap pengumpulan data

Tahap ini merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan Kabupaten Bogor dalam menerbitkan sukuk daerah baik dari segi pemerintahan, infrastruktur, sektor ekonomi, demografi, lingkungan sosial masyarakat dan lain-lain. Data diatas diperoleh dari:

- Hasil observasi lapang untuk menilai kondisi daerah kabupaten Bogor tiap kecamatan. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan, lalu disebar observer untuk mengamati kondisi infrastruktur (jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya), sektor perekonomian (sektor-sektor penunjang perekonomian tiap kecamatan), kondisi demografi, sosial budaya dan agama masyarakat di setiap kecamatan.
- Hasil wawancara dengan pejabat-pejabat pemerintahan diantaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Bogor dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bogor. Data yang diperoleh antara lain terkait dengan kendala dan kesiapan pemerintah kabupaten Bogor dalam menerbitkan sukuk.

- Studi literatur, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti pemetaan satelit kabupaten Bogor, data kependudukan (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya), dan laporan kinerja, neraca aset, APBD dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

Kemudian informasi terkait lingkungan eksternal yang menjadi peluang dan ancaman bagi penerbitan sukuk daerah di Kabupaten Bogor, berupa regulasi pemerintah pusat, perekonomian nasional, pembangunan daerah-daerah yang berbatasan, kondisi sosial dan demografi daerah-daerah yang berbatasan, teknologi dan lingkungan lainnya yang berpengaruh.

Model analisis yang digunakan dalam tahap ini adalah Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE). Dalam model ini, masing-masing faktor pada lingkungan internal dan eksternal dijabarkan, diberi bobot dan diberi nilai sesuai dengan kondisi sebenarnya.

b. Tahap analisis data

Nilai-nilai dari faktor internal dan eksternal yang telah didapat dari hasil matrix IFE dan EFE dijabarkan dalam bentuk matriks IE (Internal Eksternal) untuk mengetahui posisi Kabupaten Bogor dalam kesiapan penerapan Instrumen sukuk daerah. Kemudian digunakan diagram SWOT dimana Informasi disusun dan dianalisis untuk memperoleh strategi yang cocok dalam menerapkan sukuk daerah di Kabupaten Bogor. Dalam tahap ini digunakan matriks SWOT agar dapat dianalisis dari 4 alternatif strategi yaitu strategi SO (Strength-Opportunity), strategi WO (Weakness-Opportunity), strategi ST (Streangths-Threats) dan strategi WT (Weakness-Threats).

c. Tahap pengambilan keputusan

Pada tahap ini strategi dirumuskan dalam tahap analisis. Kemudian diambil keputusan dalam menentukan strategi yang paling efektif dan efisien bagi pemerintah kabupaten Bogor dalam menerapkan sukuk daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2015-2019, pendapatan daerah Kabupaten Bogor cenderung meningkat selama 5 tahun (data dari BPKAD Bogor) meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016. Berikut pendapatan daerah Kabupaten Bogor.

Tabel 1. Total Pendapatan dan Persentase Kenaikan/Penurunan Kabupaten Bogor

Tahun	Pendapatan	Persentase kenaikan/penurunan
2015	6.032.847.734.883	-
2016	5.973.280.685.746	-0,99%
2017	6.975.053.078.040	16,77%
2018	7.300.403.120.900	4,66%
2019	8.137.989.873.806	11,47%

Berdasarkan data LRA 2015-2019, pendapatan daerah terbanyak diperoleh dari pendapatan transfer. Namun, persentase pendapatan asli daerah setiap tahun cenderung meningkat, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016.

Tabel 2. Persentase Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Kabupaten Bogor

Tahun	Pendapatan	Pendapatan asli daerah	Pendapatan transfer	Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2015	6.032.847.734.883	2.002.209.819.262 (33,19%)	3.861.433.017.376 (64,01%)	169.204.898.245 (2,80%)
2016	5.973.280.685.746	2.292.175.674.801 (38,37%)	3.595.574.736.135 (60,19%)	85.530.284.810 (1,43%)
2017	6.975.053.078.040	2.593.258.648.374 (37,18%)	3.781.900.015.038 (54,2%)	599.894.414.628 (8,60%)
2018	7.300.403.120.900	2.794.660.740.152 (38,28%)	3.945.601.285.124 (54,05%)	560.141.095.624 (7,67%)
2019	8.137.989.873.806	3.161.165.915.498 (38,84%)	4.498.672.696.056 (55,26%)	480.151.262.252 (5,90%)

Persentase pendapatan transfer yang masih tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan daerah masih tergantung pada pendapatan transfer dengan nilai lebih dari 50% setiap tahunnya. Dengan diterbitkannya sukuk daerah, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi pendapatan transfer yang lebih banyak komponennya adalah dana dari APBN.

Belanja Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2015-2019, belanja daerah kabupaten Bogor mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, dari segi selisih antara pendapatan dan pengeluaran ada tahun 2015, 2017 dan 2019 mengalami surplus sedangkan pada tahun 2016 dan 2018 mengalami defisit.

Tabel 3. Total Pengeluaran Daerah dan Surplus/Defisit Kabupaten Bogor

Tahun	pengeluaran	Surplus/defisit
2015	5.638.198.865.486	394.648.869.396
2016	6.465.300.553.876	(492.019.868.130)
2017	6.875.742.319.986	99.310.758.054
2018	7.304.964.072.680	(4.560.951.780)
2019	7.771.218.179.777	366.771.694.029

Defisit anggaran terbesar terjadi pada tahun 2016 dimana daerah defisit sampai Rp.492.019.868.130. Defisit anggaran kemudian sempat terjadi pada tahun 2018. Namun angkanya lebih kecil dibanding yang terjadi pada tahun 2016.

Kondisi Pembangunan Di Kabupaten Bogor

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh observer ke 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor untuk meninjau kondisi dan ketimpangan pembangunan di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor. Diperoleh hasil sebagai berikut:

Ketimpangan Tingkat Pembangunan

Tingkat pembangunan di kecamatan-kecamatan paling luar yang berbatasan dengan daerah lain cenderung lebih lambat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang berada ditengah atau

berdekatan dengan kota Bogor. Hal ini terbukti dari pembangunan infrastruktur yang masih cenderung tertinggal dari kecamatan-kecamatan di bagian tengah baik jalan raya, fasilitas umum dan aspek perekonomian strategis, seperti di kecamatan Jasinga dan Sukajaya yang merupakan kecamatan paling Barat dan berbatasan dengan kabupaten Lebak Banten serta merupakan kecamatan paling jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten yaitu Cibinong. Akses jalan dan penerangan lampu kurang layak serta dampak bencana longsor yang belum ditanggulangi semakin meningkatkan ketimpangan pembangunan dengan kecamatan lain. Disatu sisi, kecamatan-kecamatan paling luar tersebut memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan kecamatan dibagian dalam yang tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kecamatan terkait, mereka mengaku sudah ada rencana pembangunan infrastruktur baik jalan maupun fasilitas-fasilitas lainnya.

Tingkat Kepadatan Penduduk

Kecamatan-kecamatan paling luar, memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan dibagian dalam. Namun, ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya dimana kecamatan paling luar cenderung lebih sedikit penduduknya, sehingga tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi di kecamatan bagian dalam, namun sangat rendah dikecamatan bagian luar.

Pemanfaatan Potensi Aspek Perekonomian

Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan bahwa kecamatan-kecamatan terluar memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di daerah dalam. Ditemukan pula banyaknya lahan-lahan yang potensial untuk dikembangkan. Untuk daerah pegunungan, potensi perekonomian yang bisa dikembangkan diantaranya perekonomian pertanian, wisata dan agrowisata. Sedangkan untuk daerah lain aspek perindustrian maupun perdagangan.

Analisis Strategi

Pada sub bab ini, penulis melakukan analisis untuk menentukan strategi yang tepat digunakan dalam mengimplementasikan sukuk berdasarkan pengamatan ke 40 kecamatan dan hasil wawancara yang dilakukan ke dinas-dinas terkait diantaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor,

Analisis IFE (Internal Factor Evaluation)

Berikut hasil analisis internal factor evaluation (IFE) yang telah dianalisa.

Tabel 4. Analisis IFE

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan				
1	Kecamatan-kecamatan terluar memiliki wilayah yang cukup luas	0,1	4	0,4
2	Adanya perbaikan/peningkatan pembangunan fasilitas dan infrastruktur masyarakat di wilayah terluar	0,08	2	0,16
3	Kepadatan penduduk yang cukup tinggi di daerah sekitar pusat pemerintahan	0,07	3	0,21
4	Banyaknya titik lokasi ekonomi wisata dan	0,1	4	0,4

	pertanian/ perkebunan			
5	Bank-bank syariah di Kabupaten Bogor yang mulai banyak dan diminati masyarakat	0,09	3	0,27
6	Peraturan-peraturan daerah yang mendukung rencana pembangunan	0,07	4	0,28
7	Keterbukaan daerah terhadap investor	0,08	4	0,32
8	Tingkat pembangunan yang cukup tinggi di wilayah bagian dalam	0,06	3	0,18
9	Banyaknya pembangunan yang berasal dari investasi	0,04	3	0,12
Kelemahan				
1	Kurangnya pemahaman skema penerbitan sukuk di lingkungan pemerintah daerah	0,04	1	0,04
2	Tingkat pembangunan yang tidak merata di kecamatan terluar	0,04	1	0,04
3	Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata	0,06	1	0,06

4	potensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan keuangan	0,09	1	0,09
5	Jumlah investasi yang sempat menurun 2 tahun terakhir	0,07	2	0,14
Total Bobot Kelemahan		1,0		2,77

Berdasarkan Tabel diatas analisis faktor internal kekuatan dan kelemahan dari implementasi sukuk daerah memperoleh total keseluruhan nilai skor 2,77. Faktor strategi internal (kekuatan) yang memiliki nilai paling tinggi adalah banyaknya titik lokasi ekonomi wisata dan pertanian/perkebunan dan Kecamatan-kecamatan terluar memiliki wilayah yang cukup luas. Hal ini berdasarkan hasil observasi dimana diperoleh banyaknya potensi yang bisa dikembangkan sebagai titik wisata maupun pertanian/perkebunan di wilayah Daerah Kabupaten Bogor, karena selain faktor geografis juga didukung oleh iklim di daerah.

Faktor strategi internal (kelemahan) yang memiliki nilai paling rendah adalah kurangnya pemahaman skema penerbitan sukuk di lingkungan pemerintah daerah dan tingkat pembangunan yang tidak merata di kecamatan terluar. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan dinas-dinas terkait yang menunjukkan bahwa pemahaman sukuk masih kurang serta hasil observasi yang menunjukkan ketimpangan pembangunan yang cukup tinggi.

Analisis EFE (External Factor Evaluation)

Berikut hasil analisis external factor evaluation (EFE) yang telah dianalisa.

Tabel 5. Analisis EFE

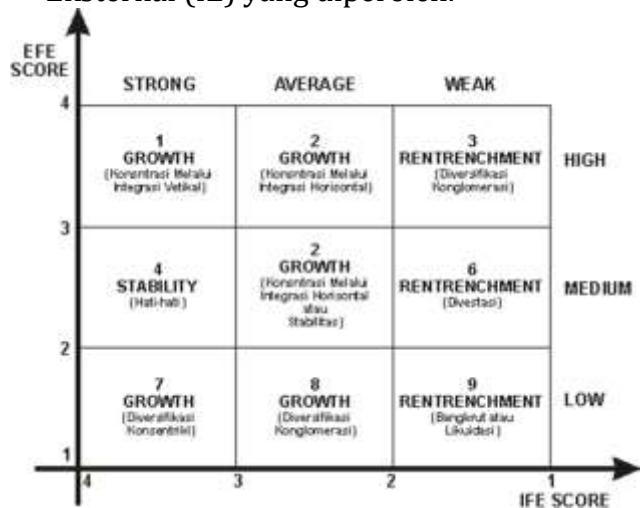
N o	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang				
1	Dukungan pemerintah pusat terkait otonomi daerah	0,13	3	0,39
2	Skema penerbitan sukuk Daerah sudah diterbitkan OJK	0,15	3	0,45
3	Kemajuan dalam bidang teknologi sistem informasi	0,14	4	0,56
4	Mulai banyaknya lembaga keuangan syariah	0,15	4	0,6
5	Keberhasilan sukuk ritel yang dikeluarkan oleh negara	0,16	4	0,64
Ancaman				
1	Pandemi covid-19 yang masih berlangsung	0,05	1	0,05
2	Belum adanya daerah yang menerapkan sukuk (tidak ada benchmarking)	0,07	1	0,07
3	Daerah lain yang berbatasan langsung cenderung mengalami masalah pembangunan yang sama	0,08	1	0,08
4	Citra investasi syariah yang kurang baik	0,07	2	0,14

	karena adanya oknum investasi			
Total Ancaman	Bobot	1,0		2,98

Berdasarkan Tabel diatas analisis faktor eksternal peluang dan ancaman Sukuk Daerah memperoleh total keseluruhan nilai skor sebesar 2,98. Faktor strategi eksternal (peluang) yang memiliki nilai paling tinggi adalah keberhasilan sukuk ritel yang dikeluarkan oleh negara. Komponen ini menjadi peluang paling besar karena menjadi bukti bahwa sukuk bisa menjadi instrumen investasi yang menguntungkan. Faktor strategi eksternal (ancaman) yang memiliki nilai paling kecil adalah Pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Pandemic covid 19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian terutama sektor pariwisata yang tentu saja menjadi sektor unggulan perekonomian kabupaten Bogor.

Matriks IE (Internal Eksternal)

Berikut hasil matriks Internal Eksternal (IE) yang diperoleh.



Gambar 1. Matriks IE

Garis IFE dan EFE bertemu di kuadran 5 *Growth* (konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas). Strategi ini dalam konteks penerapan sukuk artinya, investasi sukuk sebaiknya dilakukan pada sektor-sektor yang sudah terbukti diminati investor. Berdasarkan data dari DPMPSTP Kabupaten Bogor pada 2021 sektor dengan

jumlah nilai investasi terbanyak adalah Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan total nilai investasi mencapai Rp. 2.109.197.044.708, kemudian sektor Perdagangan dan Reparasi dengan total nilai investasi mencapai Rp. 1.733.906.114.448.

Dari matriks IE bisa diketahui kesiapan Kabupaten Bogor dalam menerapkan instrumen investasi sukuk, diantaranya:

- a. kuadran 5 menandakan bahwa kabupaten Bogor mampu menerbitkan sukuk daerah, namun perlu kajian yang mendalam terutama edukasi mengenai sukuk kepada para pimpinan dan staff di lingkungan pemerintahan daerah.
- b. Kabupaten Bogor mampu menunjukkan diri sebagai daerah yang memiliki potensi pengembangan yang bagus, ditunjukkan dari banyaknya investasi yang masuk ke daerah, namun pembangunan masih terpusat di daerah bagian tengah sedangkan daerah bagian terluar masih terlambat.
- c. Implementasi sukuk sesuai dengan motto Kabupaten Bogor yaitu TEGAR BERIMAN, dimana pemanfaatan sukuk diharapkan akan membuat daerah semakin tegar dalam melaksanakan pembangunan serta dijalankan sesuai dengan syariat Islam sehingga meningkatkan keimanan.

Analisis SWOT

Untuk mengetahui prioritas dan keterkaitan antar strategi berdasarkan SWOT, maka setelah dilakukan pembobotan IFE-EFE elemen SWOT, tahap selanjutnya adalah melakukan interaksi kombinasi strategi internal sebagai berikut.

Tabel 6. Analisis Matriks SWOT

Matriks SWOT	Strength:	Weakness:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan-kecamatan terluar memiliki wilayah yang cukup luas 2. Adanya perbaikan/peningkatan pembangunan fasilitas dan infrastruktur masyarakat di wilayah terluar 3. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi di daerah sekitar pusat pemerintahan 4. Banyaknya titik lokasi ekonomi wisata dan pertanian/pertanian 5. Bank-bank syariah di Kabupaten Bogor yang mulai banyak dan diminati masyarakat 6. Peraturan-peraturan daerah yang mendukung rencana pembangunan 7. Keterbukaan daerah terhadap investor 8. Tingkat pembangunan yang cukup tinggi di wilayah bagian dalam 9. Banyaknya pembangunan yang berasal dari investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman skema penerbitan sukuk di lingkungan pemerintah daerah. 2. Tingkat pembangunan yang tidak merata di kecamatan terluar. 3. Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. 4. potensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan keuangan. 5. Jumlah investasi yang sempat menurun 2 tahun terakhir
	Opportunity:	Strategi WO:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah pusat terkait otonomi daerah. 2. Skema penerbitan sukuk Daerah sudah diterbitkan OJK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan lahan-lahan di daerah terluar dalam bentuk pengembangan sektor perekonomian, bisa dalam 1. Meningkatkan kemampuan literasi dan mekanisme sukuk di lingkungan pemerintahan daerah (W1-O2) 2. Membuat fokus rencana pengembangan

<p>3. Kemajuan dalam bidang teknologi sistem informasi.</p> <p>4. Mulai banyaknya lembaga keuangan Syariah.</p> <p>5. Keberhasilan sukuk ritel yang dikeluarkan oleh negara.</p>	<p>bentuk pertanian, perkebunan dan/atau sesuai matriks IE dalam bentuk pengembangan investasi perumahan, industri dan perkantoran (S1-01)</p> <p>2. Bekerjasama dengan lembaga perbankan syariah di Bogor baik dalam promosi maupun penerbitan sukuk daerah. (S5-03)</p> <p>3. Mensosialisasikan sukuk daerah kepada investor (S7-03)</p> <p>4. Membuat rencana pengembangan pembangunan di daerah terluar dengan menggunakan skema sukuk (S2-02)</p> <p>5. Menjadikan mekanisme sukuk ritel sebagai acuan penerbitan dan skema pengelolaan sukuk daerah (O5-S6)</p>	<p>pada daerah terluar dengan menggunakan skema investasi berbasis sukuk (W2-04)</p> <p>3. Memberikan pelatihan kepada calon staf pengelola sukuk baik dari segi hukum, mekanisme dan syariat (W4-02)</p> <p>4. Memanfaatkan sistem teknologi informasi sebagai media promosi, sosialisasi dan interaksi dengan investor serta masyarakat agar memudahkan dalam transaksi (W5-03)</p>
<p>Threat:</p> <p>1. Pandemi covid-19 yang masih berlangsung</p> <p>2. Belum adanya daerah yang menerapkan sukuk (tidak ada benchmarking)</p> <p>3. Daerah lain yang berbatasan langsung cenderung</p>	<p>Strategi ST:</p> <p>1. Memanfaatkan pembangunan di daerah dalam sebagai contoh baik penerapan investasi di daerah (S8-02)</p> <p>2. Bekerja sama dengan daerah perbatasan untuk sama-</p>	<p>Strategi WT:</p> <p>1. Memanfaatkan pertemuan virtual untuk mengedukasi staf dan pimpinan dilingkungan daerah terkait sukuk (W1-S1)</p> <p>2. Menjadi conoh bagi daerah lain dalam penerbitan sukuk terutama untuk membangun</p>

<p>mengalami masalah pembangunan yang sama.</p> <p>4. Citra investasi syariah yang kurang baik karena adanya oknum investasi</p>	<p>sama membangun akses jalan demi kelancaran pembangunan di semua daerah. (S9-04)</p> <p>3. Mengkampanyekan agrowisata sebagai sektor unggulan ekonomi daerah (S4-01)</p> <p>4. Mensosialisasikan skema investasi sukuk ke masyarakat dan investor (S3-04)</p>	<p>daerah terluar (W2-03)</p>
--	---	-------------------------------

Strategi Penerapan sukuk daerah di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh strategi sebagai berikut:

Strategi SO:

1. Memanfaatkan lahan-lahan di daerah terluar dalam bentuk pengembangan sektor perekonomian, bisa dalam bentuk pertanian, perkebunan dan/atau sesuai matriks IE dalam bentuk pengembangan investasi perumahan, industri dan perkantoran (S1-01).
2. Bekerjasama dengan lembaga perbankan syariah di Bogor baik dalam promosi maupun penerbitan sukuk daerah. (S5-03)
3. Mensosialisasikan sukuk daerah kepada investor (S7-03)
4. Membuat rencana pengembangan pembangunan di daerah terluar dengan menggunakan skema sukuk (S2-02)
5. Menjadikan mekanisme sukuk ritel sebagai acuan penerbitan dan skema pengelolaan sukuk daerah (O5-S6)

Strategi WO:

1. Meningkatkan kemampuan literasi dan mekanisme sukuk di lingkungan pemerintahan daerah (W1-02)
2. Membuat fokus rencana pengembangan pada daerah terluar dengan menggunakan skema investasi berbasis sukuk (W2-04)

3. Memberikan pelatihan kepada calon staff pengelola sukuk baik dari segi hukum, mekanisme dan syariat (W4-02)
4. Memanfaatkan sistem teknologi informasi sebagai media promosi, sosialisasi dan interaksi dengan investor serta masyarakat agar memudahkan dalam transaksi (W5-03)

Strategi ST:

1. Memanfaatkan pembangunan di daerah dalam sebagai contoh baik penerapan investasi di daerah (S8-02)
2. Bekerja sama dengan daerah perbatasan untuk sama-sama membangun akses jalan demi kelancaran pembangunan di semua daerah (S9-04)
3. Mengkampanyekan agrowisata sebagai sektor unggulan ekonomi daerah (S4-01)
4. Mensosialisasikan skema investasi sukuk ke masyarakat dan investor (S3-04)

Strategi WT:

1. Memanfaatkan pertemuan virtual untuk mengedukasi staf dan pimpinan dilingkungan daerah terkait sukuk (W1-S1)
2. Menjadi conoh bagi daerah lain dalam penerbitan sukuk terutama untuk membangun daerah terluar (W2-03)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil diantaranya pertama, posisi kabupaten bogor terkait dengan kesiapan penerapan sukuk berada di kuadran 5 menandakan bahwa kabupaten Bogor mampu menerbitkan sukuk daerah, namun perlu kajian yang mendalam terutama edukasi mengenai sukuk kepada para pimpinan dan staf di lingkungan pemerintahan daerah. Kabupaten Bogor mampu menunjukkan diri sebagai daerah yang memiliki potensi pengembangan yang bagus, ditunjukkan dari banyaknya investasi yang masuk ke daerah, namun pembangunan masih terpusat di daerah bagian tengah sedangkan daerah bagian terluar masih terlambat. Implementasi sukuk sesuai dengan motto Kabupaten Bogor yaitu TEGAR BERIMAN, dimana

pemanfaatan sukuk diharapkan akan membuat daerah semakin tegar dalam melaksanakan pembangunan serta dijalankan sesuai dengan syariat Islam sehingga meningkatkan keimanan. Kedua, strategi yang bisa diterapkan antara lain; bekerjasama dengan lembaga perbankan syariah di Bogor baik dalam promosi maupun penerbitan sukuk daerah, mensosialisasikan sukuk daerah kepada investor, membuat fokus rencana pengembangan pada daerah terluar dengan menggunakan skema investasi berbasis sukuk, memanfaatkan pembangunan di daerah dalam sebagai contoh baik penerapan investasi di daerah dan mengkampanyekan agrowisata sebagai sektor unggulan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, Rina, dkk (2017) "Optimalisasi Peran Sukuk dalam Menumbuhkan Sektor Riil di Indonesia," Jurnal Muamalah, Vol. 3, No. 1, h.15-32.
- Anto, Ferry (2021), "Gagasan Sukuk Daerah sebagai Instrumen Investasi" hasil wawancara pribadi: 8 Oktober 2021, Bappeda Litbang Kabupaten Bogor
- Dede (2019) "Konsep Hukum Sukuk Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah", Pemuliaan Hukum, Vol. 2, No 2, h. 77-86
- Fatah, Dede Abdul (2011), "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan", Al-'Adalah, Vol. 10, No 1, h.35-45
- Fatmawati, Anis (2021), "Gagasan Sukuk Daerah sebagai Instrumen Investasi" hasil wawancara pribadi: 2 November 2021, BPKAD Kabupaten Bogor
- Indriasari, Ika (2014) "Sukuk sebagai Alternatif Instrumen Investasi dan Pembiayaan". Bisnis Vol. 2, No. 1, h. 61-76
- Kaffah, Nurfahmi Islami (2019) Implementation of Regional Sukuk (Islamic Bonds) as a Solution for

- Regional Economic Development in Indonesia. *Prosiding The 9th Annual International Conference (AIC)* Syiah Kuala University on Social Sciences
- Kholis, Nur (2010), "Sukuk: Instrument Investasi yang Halal dan Menjanjikan," *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, h. 145-159.
- Komarudin, Muhamad (2019), Sukuk daerah: Tinjauan Kebutuhan dan Kelayakan, *Prosiding Seminar Nasional Universitas Djuanda 2019*, Bogor, 88.
- Komarudin, Muhamad (2021), "Foreign Debt in The Perspektif of tafsir Fii Zilal Al-Qur'an by Sayyid Qutb" *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, h. 41-55.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
- Pratiwi, Angrum, dkk (2017) Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur". *Al-Tijany Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2. h. 155-176
- Sudarsono, Heri (2008), "Peran Obligasi Syariah (Sukuk) Bagi Pembangunan Nasional," *Aplikasi Bisnis D3 UII*. Vol. 7, No. 12, h. 1053-1072.
- Suriadi, Irwan, Dkk (2020). "Analisis Peluang Dan Tantangan Penerbitan Sukuk Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Di Nusa Tenggara Barat (NTB)", *Ekonobis*, Vol 6, No 2, h. 27-57
- Utami, Yayie Restu (2017), "Penentuan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Bogor Bagian Timur" *JOM Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 1, No 1, h. 1-8.
- Yuliastanti, Lusdiana (2021). "Gagasan Sukuk Daerah sebagai Instrumen Investasi" *hasil wawancara pribadi: 14 oktober 2021*, DPMPTSP Kabupaten Bogor